

ARTICLE

by Asri Wijayanti

Submission date: 12-Feb-2020 09:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 1255840667

File name: 39-44_bu_asri.pdf (292.8K)

Word count: 1745

Character count: 10813

4. Negara Hadir Dalam Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja Pertanian Berbasis Aquaponik di Kupang

Asri Wijayanti, Christiana Sri Murni

FH UM Surabaya, FH Universitas Flores

asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id - 081239250448

Abstrak

Lapangan kerja yang tersedia seringkali dianggap tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja. Pola mencari pekerjaan melalui migrasi telah dilakukan oleh tenaga kerja di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seharusnya pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri dapat dikurangi dengan swapekerja melalui pembukaan lahan pertanian di pekarangan rumah sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran negara dalam penciptaan lapangan kerja pertanian di Kupang. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan socio legal. Hasil dari penelitian ini adalah negara seharusnya dapat melakukan program perluasan lapangan kerja pertanian di Kupang, berbasis aquaponic.

Kata Kunci : lapangan kerja, aquaponic, swapekerja, Kupang.

Pendahuluan

Lapangan kerja yang tersedia seringkali dianggap tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja. Jumlah penduduk Indonesia, pada tahun 2019 adalah 266,91 juta orang (databoks, 2019). Dari jumlah itu, terdapat 136,18 juta orang angkatan kerja di Indonesia saat ini sampai dengan Februari 2019. Dari jumlah itu terdapat 74,08 juta orang yang bekerja pada kegiatan informal (bps, 2019). Dari data ini dapat diketahui belum semua angkatan kerja adalah pekerja. Baik sebagai pekerja formal maupun informal. Jumlah angkatan kerja yang tersedia lebih besar daripada jumlah lapangan pekerjaan.

Lapangan kerja dapat diciptakan atau diperluas oleh siapa saja. Tidak perlu menunggu dari orang lain. Sayangnya, belum semua angkatan kerja mau menciptakan lapangan kerja baru secara swakarya. Secara umum angkatan kerja lebih meletakkan harapan mendapatkan pekerjaan dari orang lain. Baik sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau bekerja di perusahaan swasta.

Perluasan lapangan kerja menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini sebagai implementasi dari tugas pemerintah untuk melaksanakan pemberian jaminan perlindungan hukum atas hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Penjabaran lebih lanjut tentang kesempatan kerja diatur dalam 39-41 UU 13/2003 tentang keteagakerjaan.

Penciptaan dan perluasan kerja telah menjadi bagian dari program kerja pemerintah. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi pengangguran. Anggapan sulitnya lapangan pekerjaan dan kondisi alam yang tidak mendukung, menjadikan tenaga kerja di Kupang (Nusa Tenggara Timur) mencari pekerjaan di tempat lain. Pola mencari pekerjaan melalui migrasi telah dilakukan oleh tenaga kerja di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seharusnya pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri dapat dikurangi dengan swakarya melalui pembukaan lahan pertanian di pekarangan rumah sendiri.

Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran negara dalam penciptaan lapangan kerja pertanian di Kupang. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan socio legal.

Diskusi dan Pembahasan

Negara dan Masyarakat.

Hubungan antara negara dan masyarakat pada hakekatnya merupakan pembahasan terkait kekuasaan. Bagaimana pemegang kekuasaan dapat menjalankan kekuasaannya dengan amanah agar masyarakat yang ada di dalam kekuasaannya dapat hidup sejahtera. Masyarakatnya mendapat perlindungan hukum atas hak asasinya.

Hak asasi manusia, hakekatnya dapat dibagi dalam tiga hak dasar yaitu *rights to life, freedom dan security of person* (Pasal 3 Piagam PBB). Hak merupakan perwujudan dari kebebasan / freedom. Kebebasan masih bersifat filosofi yang abstrak. Dapat diwujudkan/dikonkritkan melalui pengaturan kebebasan dalam suatu peraturan perundang-undangan, menjadi "hak".

Menciptakan dan Memperluas Lapangan Kerja

³ Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Menjadi tugas Negara (pemerintah) untuk mewujudkan suatu iklim atau suasana hubungan kerja yang layak dan berkeadilan.

Implementasi dari Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 ini diantaranya melalui perluasan kesempatan kerja, yang dituangkan dalam Pasal 39 UU 13/2003, yaitu:

1. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
2. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
3. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
4. Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam hal perluasan kesempatan kerja, baik di dalam atau di luar hubungan kerja.

Perluasan kesempatan kerja harus dilaksanakan secara menyeluruh. Pasal 40 UU 13/2003 menyatakan bahwa :

1. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan tepat guna.
2. Pencipta perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja harus memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia secara tepat. Perluasan kesempatan kerja juga perlu didukung oleh lembaga keuangan. Ada program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 7%.

Program ini bertujuan untuk menggerakkan sektor ekonomi tradisional di pedesaan yang dikelola oleh rakyat melalui usaha mikro, kecil dan menengah / UMKM). KUR peternakan rakyat sebagai salah satu bentuk dari program kur dilaksanakan beberapa daerah. Penyaluran KUR selama 2018 mencapai Rp 120,35 triliun (Ekon, 2019)

Lapangan Kerja Pertanian Berbasis Aquaponic di Kupang

Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Terlebih apabila dilakukan di wilayah pertanian, akan sangat penting guna mensukseskan program nasional yaitu ketahanan pangan. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Pasal 1 angka 3 PP 17 Tahun 2015). Ketersediaan pangan yang cukup, dan mengantisipasi jangan sampai terjadi kerawanan pangan.

Terjadinya kerawanan pangan, disebabkan oleh tidak tercapainya target ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan bagi masyarakat. Hal ini menjadi paradox, mengingat Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur. Pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu/rumah tangga dari produksi pangan nasional, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. (Suharyanto, 2011)

Ketahanan pangan tidak hanya bergantung kepada ketersediaan pangan saja, tetapi juga akses dan penyerapan pangan (Mun'im, 2016). Upaya membangun ketahanan pangan keluarga, salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, diantaranya melalui pemanfaatan lahan pekarangan. pemanfaatan lahan pekarangan, diantaranya belum membudayanya budidaya pekarangan secara intensif, masih bersifat sambilan dan belum berorientasi pasar, kurang tersedianya teknologi budidaya spesifik pekarangan, serta proses pendampingan dari petugas yang belum memadai. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang dan dukungan lintas sektoral dalam pemanfaatan lahan pekarangan sehingga mampu lebih optimal dalam mendukung ketahanan pangan (Ashari, N., Saptana, N., & Purwantini, T. B., 2016).

Ketahanan pangan perlu menjadi dasar bagi kebijakan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja oleh pemerintah daerah. Begitu pula di wilayah Kupang

(Nusa Tenggara timur). Peralihan fungsi tanah banyak terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Salah satunya di Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak petani kupang menjual tanahnya agar dapat digunakan membayar biaya mencari pekerjaan di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Setiap petani di Kupang memiliki lahan rata-rata 1000 m² hingga 10.000 m², namun 90% lahan itu batu karang. Banyak petani yang pasrah lalu menjual lahan. Dan 1.739 orang mejadi buruh migran, di dalam dan luar negeri (Indonesia satu, 2019).

Di wilayah Kupang, telah ada tokoh muda yang telah menciptakan dan melakukan perluasan kesempatan kerja, melalui tehnik pertanian terpadu aquaponic. Gestianus Sino, duta petani muda terbaik tahun 2018, yang telah mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi dan mendapat hadiah belajar tentang aquaponic di australia selama 3 bulan. Gestianus melakukan penciptaan lapangan kerja secara perorangan. Ia harus mencungkil karang untuk mendapatkan tanah yang cocok untuk pertanian, kemudian melakukan treatment dasar dengan pupuk organik dari bahan lokal, pemilihan bibit sayur dan buah, dan penggunaan pupuk dan pestisida organik. Gesti menggabungkan ikan lele, ayam kampung, ternak kambing, aquaponic, semuanya dalam satu lahan. Gesti berharap lahan aquaponikny kelak dapat menjadi sekolah pertanian (wawancara dengan Gestianus tanggal 1 Mei 2019 di Kupang).

5

Akuaponik adalah tehnik budidaya tanaman yang terintegrasi dengan budidaya hewan air, seperti ikan, udang serta moluska (Rakocy et al., 2006). Budidaya tanaman melalui sistem akuaponik memiliki peluang sangat baik untuk dikembangkan. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh beberapa keunggulan yang dimiliki akuaponik dibandingkan budidaya tanaman secara konvensional. Namun demikian, pengembangan budidaya akuaponik di Indonesia masih sangat terbatas. Hal tersebut diantaranya disebabkan masih kurangnya informasi dan inovasi teknis yang tersedia. Oleh sebab itu, desiminasi teknologi akuaponik secara lebih luas melalui berbagai metode dan media masih sangat diperlukan.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini adalah, negara seharusnya dapat melakukan program penciptaan lapangan kerja pertanian di Kupang, berbasis aquaponic.

Rekomendasi

Aquaponik dapat menjadi alternatif solusi dalam menangani ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Referensi

<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/01/04/Jumlah-Penduduk-Indonesia-2019-Mencapai-267-Juta-Jiwa#Targettext=Berdasarkan%20survei%20penduduk%20antar%20sensus,132%2c89%20juta%20jiwa%20perempuan>.

[Http://Indonesiasatu.Co/Detail/Kembangkan-Pertanian-Organik-Terpadu--Gestianus-Jadi-Pembicara-Idf-Di-Jakarta](http://Indonesiasatu.Co/Detail/Kembangkan-Pertanian-Organik-Terpadu--Gestianus-Jadi-Pembicara-Idf-Di-Jakarta)

[Http://Indonesiasatu.Co/Detail/Kembangkan-Pertanian-Organik-Terpadu--Gestianus-Jadi-Pembicara-Idf-Di-Jakarta](http://Indonesiasatu.Co/Detail/Kembangkan-Pertanian-Organik-Terpadu--Gestianus-Jadi-Pembicara-Idf-Di-Jakarta)

⁶ <https://Www.Bps.Go.Id/Pressrelease/2019/05/06/1564/Februari-2019--Tingkat-Pengangguran-Terbuka--Tpt--Sebesar-5-01-Persen.Html>

<https://Ekon.Go.Id/Berita/View/Negara-Hadir-Perkuat-Ekonomi.4585.Html>

⁴ Rakocy, J.E., M.P. Masser, And T.M. Losordo. 2006. Recirculating Aquaculture Tankproduction Systems: Aquaponics— Integrating Fish And Plant Culture. Srac Publication No. 464.

Suharyanto, H. (2011). KETAHANAN PANGAN. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i2.633>

Yudi Sastro, Akuaponik : Budidaya Tanaman Terintegrasi Dengan Ikan, Permasalahan Keharaan Dan Strategi Mengatasinya, Buletin Pertanian Perkotaan Volume 5 Nomor 1, 2015.

ARTICLE

ORIGINALITY REPORT

11 %	%	6 %	12 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	3 %
2	Wahyuni Wahyuni, Lestari Sukarniati. "ANALISIS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA MISKIN", Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 2018 Publication	2 %
3	Submitted to Jayabaya University Student Paper	2 %
4	Benz Kotzen. "An Investigation of Aquaponics Using Brackish Water Resources in the Negev Desert", Journal of Applied Aquaculture, 10/2010 Publication	1 %
5	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	1 %
6	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On